

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.¹

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah daerah menjalankan program pemberdayaan masyarakat dimana program ini dipercaya dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara masyarakat desa dengan kota di Indonesia. Kebijakan pemberdayaan masyarakat tertuang didalam ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang kewenangan pemerintahan daerah, yang menjelaskan "pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah menurut asas otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia". Pemerintahan daerah akan dapat menjalankan fungsinya dalam rangka otonomi atau desentralisasi secara baik, bila ia menerima cukup sumber-sumber keuangan untuk melaksanakan fungsi tersebut.²

RT dan RW adalah istilah yang tidak asing di Indonesia hal ini cukup menarik karena Indonesia merancang lembaga dalam masyarakat yang dibagi atas dasar wilayah hingga jangkauan yang kecil di bawah kelurahan RW salah satu bentuk organisasi masyarakat yang dibuat berdasarkan pembagian wilayah pembentukan RW yang terdiri atas beberapa RT dilakukan dengan musyawarah warga atau pengurus RT dan ditetapkan oleh desa atau kelurahan.

¹ Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004) 1.

² Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan* (Jakarta: LP3ES, 1990)

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain disebutkan bahwa Rukun Warga disingkat RW atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan.³

Rukun Warga (RW) adalah istilah pembagian wilayah dibawah kelurahan. Rukun Warga adalah lembaga masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga (RT) di wilayah kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintah dan masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Lurah, setiap RW sebanyak-banyaknya terdiri dari minimal terdiri 3 RT dan maksimal 10 RT.

Ada beberapa tugas dan fungsi RW dan perdesaan salah satunya mendukung pemerintahan desa dalam pembangunan, banyak kenyataan di perdesaan peran RW terhadap pembangunan desa di ambil alih oleh kepala desa pembangunan merupakan hal yang sangat mendasar dalam sebuah negara pemerintahan berkewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya dan salasanya adalah melalui pembangunan, di era sekarang pembangunan bukanlah di titik beratkan pada pembangunan di wilayah perkotaan tetapi pembangunan sudah dimulai dari wilayah perdesaan.⁴

Rukun Warga (RW) harus terlebih dahulu dapat memantapkan kedudukan yaitu sebagai mitra pemerintahan kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat. Dengan adanya Rukun Warga yang mengayomi kehidupan masyarakat dalam pembangunan, memaksa untuk dapat melaksanakan fungsinya agar pelaksanaan kegiatan pembangunan bisa berjalan lebih optimal dan menyeluruh di wilayah kelurahan.

Saran dalam kendala pelaksanaan fungsi adalah pemberdayaan fungsi RW kelurahan guna mengatasi kendala intern kerjasama dengan akademisi-akademisi atau pihak pemerintah daerah guna pelatihan pemberdayaan

³ Merwy Rande Layuk *Studi Tentang Kepemimpinan Ketua RT di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 8 No. 12, 2013, 1.

⁴ Tumpal P. Saragi, *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa alternatif Pemberdayaan Desa*, (Jakarta, CV Cipiruy, 2004) 243.

masyarakat yang ditujukan kepada warga kelurahan dan pemberdayaan fungsi dalam kendala ekstern komunikasi antar pemerintah dengan RW harus ditingkatkan, kelurahan diharapkan dapat segera mengatasi hambatan-hambatan yang ada, untuk mengatasi hambatan mengenai sarana dan prasarana Rukun Warga (RW) kaitanya dengan dana operasional dari pemerintah kota dan penambahan dana operasional Rukun Warga (RW) kelurahan yang telah dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja kelurahan serta uang kas masyarakat kelurahan diharapkan secara sukarela meluangkan waktunya (malam hari) untuk membahas masalah-masalah yang ada dan lebih berkonsentrasi pada fungsinya agar didalam penerapan antar anggota Rukun Warga (RW) kelurahan dapat dilaksanakan melalui hubungan kerjasama yang baik.⁵

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa bahwa RT dan RW adalah lembaga yang di bentuk melalui musyawarah masyarakat stempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang di tetapkan oleh pemerintah desa atau lurah RT dan RW mempunyai fungsi sebagai pengkoordinasi antar warga. Jembatan aspirasi antar sesama masyarakat dengan pemerintah daerah menjadi penenga penyelesaian masalah-masalah kemasyarakatan yang di hadapin warga, sedangkan tugas-tugasnya antara lain membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah kota, memelihara kerukunan hidup warga, menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan pengembangan aspirasi dan suadaya murni masyarakat.⁶

Pengurus RT/RW adalah garda terdepan pemberdayaan kelurahan bahkan pembangunan nasional peningkatan kualitas serta kesejahteraan mereka adalah salah satu faktor berdampak besar bagi program pembangunan desa dan nasional, dengan meningkatnya pendorong

⁵ Eko, Sutoro. *Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda, Desember 2002.

⁶ Peraturan menteri dalam negeri No 18 Pedoman penataan kelembagaan masyarakat.

suksesnya program pemberdayaan tersebut efektivitas RT/RW dalam pemberdayaan akan kualitas pengurus RT/RW maka akan berjalannya fungsi mereka dengan maksimal. Dari masalah diatas maka penulis mengangkat judul **“EFEKTIVITAS KEDUDUKAN RUKUN WARGA (RW) DALAM MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN PERWALI NOMOR 49 TAHUN 2020 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN KELURAHAN DI KOTA CIREBON (STUDI KASUS PADA KELURAHAN KARYAMULYA, KECAMATAN KESAMBI, KOTA CIREBON)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, peneliti menetapkan identifikasi masalah, batasan masalah dan pertanyaan penelitian yang akan diteliti. Identifikasi masalah akan membahas mengenai wilayah kajian, pendekatan penelitian dan jenis masalah. Batasan masalah akan membahas terkait suatu pembatasan agar penelitian tidak meluas dari topik bahasan utama.⁷ Pertanyaan penelitian menggambarkan mengenai topik yang akan diteliti. Identifikasi masalah, batasan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan peneliti sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian Penelitian

Wilayah kajian penelitian proposal skripsi ini tergolong dalam wilayah kajian Hukum Pemerintahan Daerah, dengan topik kajian Sistem Pemerintahan Desa. Penelitian ini mengkaji tentang Efektivitas Kedudukan Rukun Warga Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dan Pembangunan Berdasarkan Perwalik Nomor 49 Tahun 2020 (Studi Pada Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon).

⁷ Amaruddin, Metode Penelitian Sosial, (Yogyakarta : Parama Ilmu, 2016), hlm 98

b. Jenis Masalah

Terdapat beberapa jenis masalah yang terjadi pada efektivitas RW dalam pemberdayaan masyarakat antara lain:

1. Adanya hubungan antara pengurus RW dengan pihak kelurahan bukan antara atasan, tetapi sebagai mitra dalam mensukseskan program-program Pemerintah secara merata.
2. Terdapat pengawasan keamanan RW terhadaparganya tidak dapat diberikan secara maksimal.
3. Adanya masyarakat yang multikultural dan menjaga kestabilan serta keamanan di tengah masyarakat.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah dalam penelitian ini untuk menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian.⁸ Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada pandangan Hukum Positif dan Fiqh Siyasah, yang kemudian dianalisis datanya oleh penulis menggunakan penelitian kualitatif deskriptif berdasarkan sumber data primer dan sekunder terhadap dasar pelaksanaan Efektivitas Kedudukan Rukun Warga Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dan Pembangunan Kelurahan Karyamulya.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berusaha merumuskan masalah yang ingin diteliti agar tidak menyulitkan dalam pengumpulan data yang diperlukan, Maka dari itu penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana efektivitas kedudukan Rukun Warga dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan pembangunan berdasarkan Perwali Nomor 49 Tahun 2020 di Kelurahan Karyamulya?

⁸ Amaruddin, Metode Penelitian Sosial.. 99.

- b. Bagaimana efektivitas kedudukan Rukun Warga dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan pembangunan menurut perspektif Fiqh Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini dengan melihat latarbelakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui efektivitas kedudukan Rukun Warga dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan pembangunan berdasarkan Perwali Nomor 49 Tahun 2020 di Kelurahan Karyamulya.
- b. Untuk mengetahui efektivitas kedudukan Rukun Warga dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan pembangunan menurut perspektif Fiqh Siyasah.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat menambah pengetahuan dibidang hukum khususnya Hukum Tata Negara dalam aspek Sistem Pemerintahan Desa, utamanya mengenai segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan peran RW.

- a. Kegunaan Teoretik

Dalam penelitian ini diharapkan adanya kesesuaian antara pelaksanaan fungsi dan peran RW dengan hukum positif dan fiqh siyasah. Serta diharapkan untuk dapat menambah khazanah keilmuan.⁹

- b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini hadir sebagai perwujudan Tri Darma Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, khususnya program studi Hukum Tatanegara (HTN) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam sebagai sumbangan pemikiran dan mengembangkan kajian di bidang Hukum Pemerintahan Daerah, dengan topik kajian Sistem Pemerintahan Desa. Hasil penelitian propoal skripsi ini juga diharapkan dapat berguna khususnya para

⁹ Amaruddin, Metode Penelitian Sosial.. 100

akademisi yang kemudian dapat digunakan sebagai bahan bacaan atau rujukan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis melakukan berbagai penelusuran dan pencarian terkait judul penelitian ini, maka penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian, yaitu :

1. Karya Yanuardi (2015) dalam jurnalnya yang berjudul Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Riau, dengan judul Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga Dan Rukun Warga (RT/RW) Kelurahan Delima Pekanbaru. Dengan hasil Penguasaan Tugas Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga Kelurahan Delima secara umum sudah memahami dan mengerti tugas yang diberikan. Namun kalau yang benar-benar ahli dalam bidang tugas yang diberikan itu tergantung pengalaman pribadi dari Ketua Rukun Tetangga atau Ketua Rukun Warga tersebut. Karena masih terasanya persaingan antara Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga.

Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pelaksanaan tugas Rukun Warga. Perbedaann dengan jurnal di atas yaitu membahas tentang Kemampuan Bekerjasama Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga masih banyak yang belum bekerjasama dengan baik terhadap sesama Ketua RT dan Ketua RW sedangkan penelitian yang kami buat yaitu mengenai Efektivitas Kedudukan Rukun Warga Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dan Pembangunan Kelurahan Karyamulya..¹⁰

2. Skripsi karya Merwy Rande Layuk (2013), Ilmu Pemerintahan FISIP UNMUL dengan judul "Studi Tentang Kepemimpinan Ketua RT di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, eJournal, dengan hasil RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh desa sedangkan

¹⁰ Yanuardi , *Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga Dan Rukun Warga (RT/RW) Kelurahan Delima Pekanbaru*. Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Riau.

berdasarkan keputusan presiden RI No.9 Tahun 2001 tentang penataan lembaga ketahanan masyarakat desa atau Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan.

Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang kepemimpinan untuk melayani masyarakat. Perbedaan skripsi di atas yaitu membahas kepemimpinan Ketua RT dalam mengorganisir kegiatan-kegiatan dalam kemasyarakatan sangatlah diperlukan supaya kegiatan-kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan keinginan dan tujuan bersama, peran Ketua RW sangat penting dan dibutuhkan dalam rangka mempercepat akses pelayanan dan efektivitas pelaksanaan kegiatan kewargaan. Sedangkan penelitian yang penulis buat membahas tentang Efektivitas Kedudukan Rukun Warga Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dan Pembangunan Kelurahan Karyamulya. Persamaannya adalah topik mengenai efektivitas pembangunan masyarakat.¹¹

3. Karya Dyah Retna Puspita DKK (2006) Jurusan Administrasi Negara, FISIP Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto dengan judul Model optimalisasi peran Ketua Rukun Warga dalam mencegah perceraian. Dengan Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, kebanyakan responden kurang mengetahui fenomena perceraian di Kabupaten Purbalingga, karena forum RT tidak pernah mendapatkan informasi tersebut. Kedua, selama menjadi Ketua RT, ada beberapa responden yang di wilayahnya terjadi kasus perceraian, tetapi kebanyakan tidak mampu mencegahnya, karena warga yang datang untuk meminta surat pengantar mengurus perceraian tersebut kebanyakan sudah bulat keputusannya.

¹¹ Merwy Rande Layuk "Studi Tentang Kepemimpinan Ketua RT di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, "Jurnal Ilmu Pemerintahan" Vol 8 No 12, 2013.

Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang peran Ketua Rukun Warga. Perbedaan penelitian di atas yaitu membahas Dari hasil ini disimpulkan bahwa upaya menurunkan kasus perceraian dapat dilakukan dengan melakukan penyuluhan ketahanan keluarga kepada kaum laki-laki secara berkesinambungan. Sedangkan penelitian yang penulis buat membahas tentang Efektivitas Kedudukan Rukun Warga Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dan Pembangunan Kelurahan Karyamulya.¹²

4. Skripsi yang ditemukan adalah Skripsi Muhammad Galuh mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta yang berjudul Peran Rukun Warga (RW) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Desa Kerambil Sawit di Desa Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi ini ditemukan dari Jurnal. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang peran RW, Tetapi skripsi Muhammad Galuh tentang meningkatkan kesejahteraan sosial di Desa Kerambil Sawit di Desa Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Skripsi yang ditemukan adalah skripsi Achmad Supriyanto mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang yang berjudul Kinerja Rukun Warga (RW) dalam Pembangunan dan Hibah. Skripsi ini di temukan dari Jurnal. Persamaan skripsi ini yaitu membahas tentang RW dan Pembangunan, sedangkan perbedaannya skripsi Achmad Supriyanto ini juga membahas tentang Hibah, sedangkan skripsi penulis hanya tentang pembangunan.

F. Kerangka Pemikiran

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-

¹² Dyah Retna Puspita DKK, *Model optimalisasi peran Ketua Rukun Tetangga dalam mencegah perceraian*. (Purwokerto: Jurusan Administrasi Negara, FISIP Universitas Jenderal Soedirman, 2006) 1.

warganya, 2). Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, dan 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga.¹³

Rukun Warga mempunyai fungsi sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat serta menyusun perencanaan pembangunan wilayah kelurahan. Dalam hal ini, lembaga ini mempunyai peranan dalam membuat dan menyusun pembangunan di wilayahnya. Dalam pembangunan, pemberdayaan masyarakat kelurahan menjadi salah satu tujuan dalam pembangunan di mana pemberdayaan dapat menunjang pembangunan suatu wilayah kelurahan. Pemberdayaan masyarakat juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Kelurahan.

Fungsi dan peran pejabat RW pada kelurahan dalam pembangunan Permendagri no. 18 tahun 2018 pasal 7 Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Seorang ketua RW mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah sebab ketua RW adalah orang yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan yang melihat langsung kondisi riil di masyarakat, tidak seperti lurah atau camat atau penyelenggara (pemimpin) pemerintahan yang lebih tinggi yang hanya tahu kondisi masyarakat berdasarkan laporan masyarakat (termasuk ketua RW).

Rukun Warga Mempunyai fungsi sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat serta menyusun perencanaan pembangunan wilayah kelurahan. Dalam hal ini, lembaga ini mempunyai peranan dalam membuat dan menyusun pembangunan di wilayahnya. Dalam pembangunan, pemberdayaan Masyarakat kelurahan menjadi salah satu tujuan dalam pembangunan di mana pemberdayaan dapat menunjang pembangunan suatu wilayah kelurahan. Pemberdayaan masyarakat juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Kelurahan.

Hubungan Rukun Warga dengan pemerintah kelurahan adalah membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. RW sesuai

¹³ Koentjaraningrat. *"Pengantar Ilmu Antropologi"*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 115-118.

dengan fungsinya menampung dan menelaah rencana dan cara pelaksanaan pembangunan yang diajukan dan menyampaikan hasil-hasil telaah tersebut kepada pemerintah kelurahan.¹⁴

Apabila dibuka kembali kebijakan otonomi daerah yang digulirkan oleh pemerintah pada saat sekarang ini, maka nampak jelas bahwa kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintah, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Disamping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengadilan dan evaluasi.¹⁵ Dalam otonomi kelurahan, semua unsur di dalamnya bertanggung jawab secara bersama-sama untuk memikirkan kemajuan kelurahan. Salah satu unsur yang bertanggung jawab tersebut adalah Rukun Warga (RW).

Dari pandangan siyasah kepemimpinan dalam Islam merupakan rahmatan lil alamin (rahmat bagi semesta alam) di dalam ajarannya berisikan tentang banyak hal, masalah pembangunan dan kesejahteraan merupakan masalah yang sangat penting karena dengannya kehidupan akan berjalan dengan baik. Manusia di muka bumi ini yang berkedudukan sebagai khalifah mempunyai amanat dari rabbnya untuk senantiasa menjalankan kehidupan di dunia dengan sebaik-baiknya.

As-Syura atau musyawarah ini adalah dasar pemerintahan yang baik, bahkan dalam Al-Qur'an sendiri ada salah satu surat yang disebut As-Syuro, ayat 38. Musyawarah ini juga telah dilakukan baik pada masa Rasulullah maupun pada masa sahabat dan dasar dari musyawarah ini adalah jaminan kebebasan yang sempurna didalam menyampaikan pendapat.

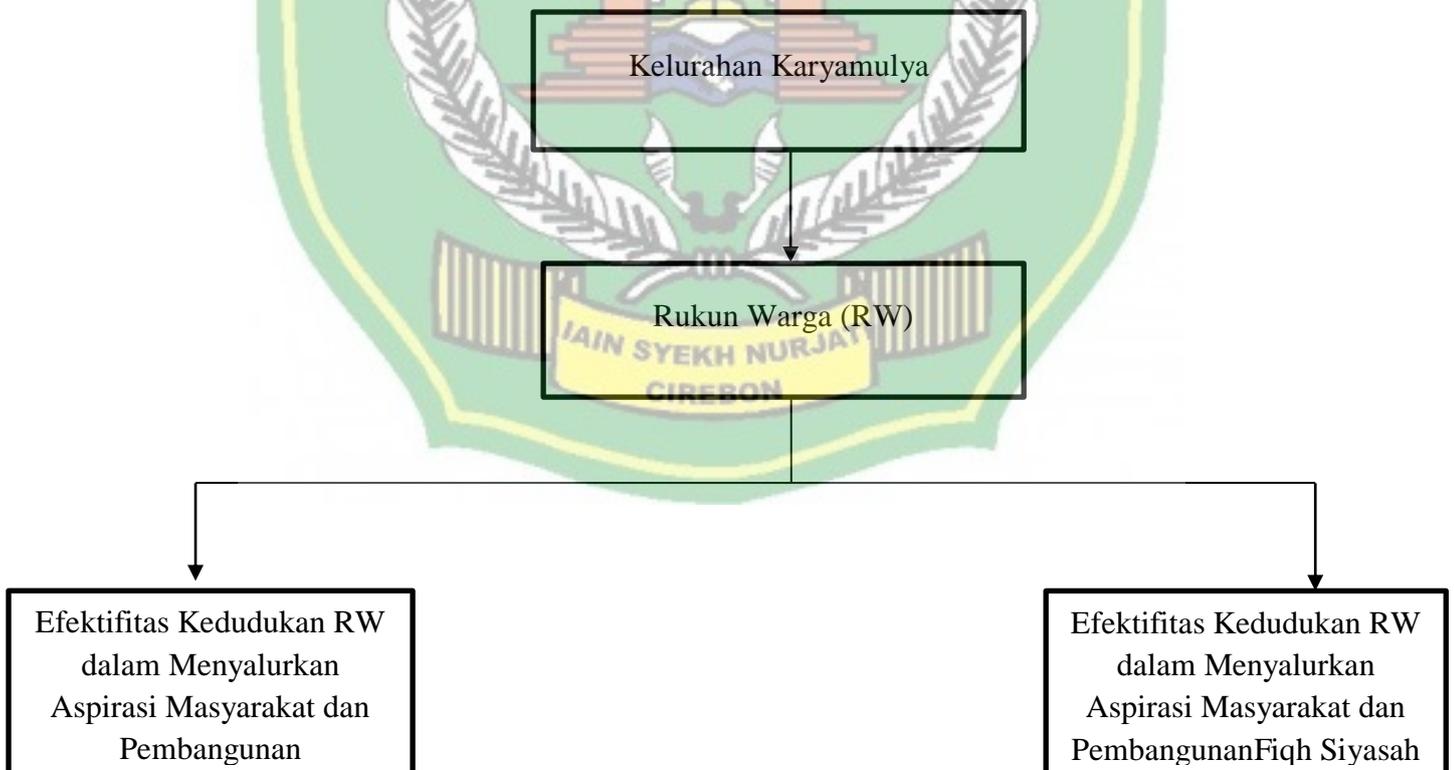
¹⁴ AW. Widjaja, Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan), (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 82.

¹⁵ Sahilun A. Nasir, Peranan Pendidikan Agama Terhadap Pemecahan Problema Remaja, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), hlm. 54

Pembangunan sebagai usaha yang dilakukan untuk merubah sebuah masyarakat menjadi lebih baik dengan mencurahkan segala tenaga, pikiran dan perjuangan dapat direalisasikan dan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat meningkat. Soal yang tampak hangat yang selalu muncul dalam berbagai diskusi saat ini ialah apakah pembangunan membutuhkan partisipasi aktif dari rakyat supaya bisa berhasil.

Dari uraian tersebut diatas maka dalam tulisan ini penulis menetapkan untuk membahas mengenai peranan, kinerja, fungsi dan peran pejabat RW pada kelurahan dalam pembangunan. Dalam mengkaji pembahasan tersebut penulis akan menggunakan kacamata hukum positif dalam hal ini Peraturan Wali Kota Cirebon No. 49 Tahun 2020 Pasal 20 Bagian Ketiga Tugas pengurus Rukun Warga dan Pasal 24 Bagian Keenam tentang Musyawarah Rukun Warga .

Adapun penulis membuat bagan dari kerangka berpikir diatas adalah sebagai berikut :



G. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan cara menganalisisnya.¹⁶

Untuk itu sangatlah penting metodologi dalam sebuah penelitian. Karena metodologi penelitian akan menjawab permasalahan yang ditetapkan mulai dari penentuan jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian baik primer maupun sekunder serta teknik pengumpulan data untuk penunjang penelitian.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian pendekatan kualitatif deskriptif mempunyai dua tujuan utama yaitu pertama, menggambarkan dan mengungkapkan (to describe and explore) dan kedua, menggambarkan dan menjelaskan (to describe and explain). Dengan mencatat segala gejala atau fenomena yang dilihat atau didengar tentang pengaruh efektivitas RW dalam pemberdayaan masyarakat Kelurahan Karyamulya Kota Cirebon melalui wawancara, observasi, dan juga dokumentasi terhadap masyarakat untuk mendapatkan informasi akurat yang kemudian akan dianalisis oleh peneliti.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan memberikan gambaran mengenai tanggung jawab perangkat Rukun Warga dalam menjalankan “Efektivitas Kedudukan Rukun Warga Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dan Pembangunan Kelurahan Karyamulya” dengan metode penelitian yang dilakukan mengacu pada kualitatif merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu

¹⁶ Tina Asmarawati, “Teknik Penulisan Karya Ilmiah Ilmu Hukum”, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 1.

¹⁷ Amaruddin, Metode Penelitian Sosial, (Yogyakarta : Parama Ilmu, 2016), hlm 98

dengan maksud mendapatkan mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atau jawaban masalah yang sedang diteliti.

3. Sumber Data

Dalam upaya merumuskan skripsi ini, penulis melakukan penelitian lapangan, maka sumber data atau informasi yang menjadi data baku peneliti, untuk diolah menggunakan jenis data primer dan sekunder yang dianggap peneliti mampu untuk mendukung penelitian ini, yaitu:¹⁸

a. Sumber Data Primer

Data yang dikumpulkan melalui hasil wawancara secara langsung dengan pihak yang menjadi obyek dalam penelitian (narasumber) yang merupakan sumber informasi utama untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang diteliti mengenai Efektivitas Kedudukan Rukun Warga Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dan Pembangunan Kelurahan Karyamulya wawancara yang peneliti lakukan dengan narasumber diantaranya, Kelurahan, RW, tokoh masyarakat, dan masyarakat Kelurahan Karyamulya yang mana peneliti susun terlebih dahulu daftar pertanyaan-pertanyaan wawancara tersebut.¹⁹

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu RW Kelurahan Karyamulya yang berhubungan dengan objek yang dikaji yakni informasi Efektivitas Kedudukan Rukun Warga Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dan Pembangunan Kelurahan Karyamulya.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap yang digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat sumber primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen dan study literatur untuk mencari dan mengumpulkan data yang digunakan terkait gambaran umum peran Kelurahan Arab Melayu. diantaranya:

¹⁸ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah. Edisi Revisi, (Jambi; Syari'ah Press, 2012), hlm. 46.

¹⁹ Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi), (Jambi : Syariah Press, 2011), hlm 178.

1) Perundang-undangan

a) Undang-Undang Dasar 1945

b) Undang-Undang

(1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang kewenangan pemerintah daerah atau asas otonomi daerah.

(2) Keputusan Presiden No. 4 Tahun 2009 tentang perturan lembaga ketahanan masyarakat desa.

(3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa.

(4) Peraturan Wali Kota No. 49 Tahun 2020 tentang lembaga kemasyarakatan kelurahan di Kota Cirebon.

2) Buku

3) Jurnal

4) Skripsi

5) Sumber data yang terkait mengenai fungsi dan peran RW

6) Website

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau Field Research yaitu penelitian secara langsung kepada sumber yang diteliti. Dalam menghimpun data yang dibutuhkan, ada beberapa teknik yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu:²⁰

a. Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung terhadap responden untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan penelitian yaitu tentang Efektivitas Kedudukan Rukun Warga Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dan Pembangunan Kelurahan Karyamulya. Dengan teknik wawancara ini akan mendorong terciptanya hubungan baik antara penulis dengan informan sehingga sangat membantu dalam upaya memperoleh informasi.

²⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif R&N, Cet Ke-19, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 203

Dalam pebelitian, penulis mencari sumber informasi dengan mewawancarai Ketua RW 14 bapak Seno, Ketua RW 15 bapak Deddy, Ketua RW 07 bapak Ade, tokoh masyarakat bapak Iwan dan masyarakat Ibu Wafa.

b. Observasi

Dalam penelitian penulis Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati langsung ke objek penelitian guna mendapatkan informasi yang ada hubungannya dengan Efektivitas Kedudukan Rukun Warga Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dan Pembangunan Kelurahan Karyamulya.²¹

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Efektivitas Kedudukan Rukun Warga Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dan Pembangunan Kelurahan Karyamulya. Dokumen bisa berbentuk tulisan dan gambar. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya sejarah dan profil Kelurahan Karyamulya sedangkan yang berbentuk gambar misalnya foto, sketsa, dan peta Karyamulya.²²

5. Teknik Analisis Data

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan teknik analisis data melalui pendekatan kualitatif yang tujuan untuk memberikan pemahaman secara lebih mendalam terkait objek permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini. Data yang didapatkan dari pendekatan kualitatif yakni berupa hasil observasi langsung dan wawancara yang disusun secara ringkas dan sistematis. Data yang telah diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan teknik "content analisis " yang kemudian diolah berdasarkan asas-asas atau konsep-konsep hukum dan perundang-undangan terkait.²³ Berdasarkan analisis tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan secara deduktif-induktif yaitu dengan beranjak dari

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* , (Jakarta: Rineka Cipta,2006),hlm. 156.

²² Arikuto Siharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pedekatan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1997) hlm 236.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif R&N,Cet Ke-19*, (Bandung: Alfabeta,2014), hlm 203.

prinsip umum kemudian ditarik menjadi khusus, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka dalam sistematika penulisan penulis akan membagi menjadi 5 bab yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini menggambarkan bentuk dan isi dari penelitian yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini terdiri teori efektivitas RW dalam pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian efektivitas, pengertian RW, tugas dan peran RW, pengertian pemberdayaan, dan pengertian masyarakat.

Bab III Gambaran Umum Kelurahan Karyamulya

Dalam bab ini berisi sejarah berdirinya Kelurahan Karyamulya, visi dan misi RW, fungsi dan peran RW, struktur RW, keadaan geografi Kelurahan Karyamulya, keadaan pemberdayaan masyarakat Karyamulya.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisa

Dalam bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan, memuat tentang kedudukan RW dalam perspektif Fiqh Siyasah dan perannya dalam mewujudkan kerukunan warga di Kelurahan Karyamulya, faktor pendorong dan penghambat RW dalam mewujudkan pembangunan Kelurahan Karyamulya.

Bab V Penutup

Dalam bab ini berisi penutup, menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Selain itu penulis juga

akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan didalam skripsi. Serta dilengkapi daftar pustaka.

